

## TINGKAT PARTISIPASI *STAKEHOLDERS* DALAM PENINGKATAN INDEKS DESA MEMBANGUN (STUDI KASUS DI KABUPATEN SAMBAS)

### *PARTICIPATION'S LEVEL OF STAKEHOLDERS IN INCREASED INDEKS DESA MEMBANGUN (CASE STUDY IN SAMBAS REGENCY)*

Junaidi<sup>1)</sup>, Edy Agustinus<sup>1)</sup>, Giska Hedyanti<sup>1)</sup>

<sup>1</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat  
Jl. Dr. Soetomo No.1 Pontianak  
\*email: idesunitas@yahoo.com

#### ABSTRACT

*This study aims to analyze the level of stakeholders participation in increasing the Indeks Desa Membangun (IDM) in Sambas Regency. This research was conducted during August until December 2019. The location of the research sample was in 4 (four) villages which were a priority for increasing the village independence status in Sambas Regency in 2020. The results of this quantitative research show that: first, the level of community participation is generally classified as "strong" and "very strong". However, the community's willingness to provide material in order to support village development falls into the "adequate" category. This is because they think that currently sufficient funding in the village is available, especially from DD and ADD; second, the level of government participation is classified as "strong" and "very strong". This means that indicators such as the availability of regulations, government involvement in program preparation, assistance in development implementation, evaluation regarding audits of DD and ADD utilization, and utilization of development results are in line with expectations. However, indicators such as the government's ability to open access to cooperation with investors in order to manage village potential still need to be improved or are included in the "adequate" category; and third, respondents assessed that the level of private sector participation, from planning to yield utilization, still needs to be improved. According to respondents, the utilization of CSR available in the private sector has not yet fully reached rural development*

**Keywords:** *Participation Level, Stakeholders, IDM*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi *stakeholders* dalam peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Sambas. Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus sampai dengan Desember 2019. Lokasi sampel penelitian terdapat di 4 (empat) desa yang di tahun 2020 menjadi prioritas peningkatan status kemandirian desa di Kabupaten Sambas. Hasil penelitian yang berciri kuantitatif ini menunjukkan bahwa: pertama, tingkat partisipasi masyarakat umumnya tergolong "kuat" dan "sangat kuat", namun, kesediaan masyarakat untuk memberikan materi dalam rangka mendukung pembangunan desa masuk dalam kategori "cukup". Hal itu dikarenakan mereka menilai pendanaan di desa saat ini sudah cukup tersedia terutama bersumber dari DD dan ADD. Kedua, tingkat partisipasi pemerintah tergolong "kuat" dan "sangat kuat", artinya indikator seperti ketersediaan regulasi, keterlibatan pemerintah dalam penyusunan program, pendampingan pelaksanaan pembangunan, evaluasi menyangkut audit pemanfaatan DD dan ADD, serta pemanfaatan hasil pembangunan telah sesuai dengan harapan. Akan tetapi, indikator seperti kemampuan pemerintah untuk membuka akses kerjasama dengan investor dalam rangka mengelola potensi desa masih perlu ditingkatkan atau termasuk di kategori "cukup". Ketiga, responden menilai tingkat partisipasi *private sector* mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan hasil masih perlu ditingkatkan. Menurut responden, CSR yang tersedia pada *private sector*, pemanfaatannya belum sepenuhnya menyentuh pembangunan di pedesaan.

**Kata Kunci:** Tingkat Partisipasi, *Stakeholders*, IDM

## PENDAHULUAN

Sejak era pemerintahan Joko Widodo, yakni mulai tahun 2014, desa menjadi fokus utama dalam pembangunan di Indonesia. Hal itu tergambar di salah satu program Nawacita yang digagas olehnya. Program yang dimaksud adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pada tahun 2016, komitmen membangun Indonesia dari pinggiran itu diperkuat dengan hadirnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun (2016) tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Peraturan tersebut diluncurkan guna mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian desa. Kemandirian desa dinilai dengan mengacu pada 3 (tiga) indeks yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Skor pada indeks itu menjadi landasan untuk menetapkan status desa, yakni mulai dari sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju hingga mandiri. Momentum itu kemudian menjadikan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten mulai memperhatikan status IDM, tidak terkecuali di Kalimantan Barat.

Namun, sayangnya status IDM di Kalimantan Barat tidak cukup menggembirakan. Pada tahun 2018 misalnya, dari 2031 desa, hanya terdapat 1 (satu) desa yang memperoleh predikat Desa Mandiri yakni Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara (eQuator.co.id, 2019).

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 52 Tahun

(2018) tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, IDM Provinsi Kalimantan Barat posisinya adalah sebagai berikut: Desa Maju 53 desa, Desa Berkembang 372 desa, Desa Tertinggal 928 desa dan Desa Sangat Tertinggal 677 desa. Keadaan ini menjadi cermin tentang masih banyaknya desa-desa di Kalimantan Barat yang perlu didorong untuk meningkatkan statusnya menjadi Desa Mandiri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 menargetkan hingga tahun 2023 terdapat 425 desa yang mampu mencapai status "Desa Mandiri".

Pada tahun 2019, status IDM pada kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Kabupaten Sambas misalnya, status IDM desa-desa di kabupaten tersebut meningkat dimana : (a) Desa Sangat Tertinggal dari 18 Desa menjadi 3 desa; (b) Desa Tertinggal dari 99 desa menjadi 45 desa; (c) Desa Berkembang dari 71 desa menjadi 108 desa; (d) Desa Maju dari 5 desa menjadi 29 desa; dan (e) Desa Mandiri dari tidak ada menjadi 8 desa (Dinas Sosial dan PMD Kab. Sambas, 2019). Atas kenyataan itu, niscaya status IDM di suatu daerah dapat ditingkatkan.

Beberapa peneliti yang telah mencurahkan perhatiannya pada topik IDM, misalnya, Kadarsih, et.al (2020) mengidentifikasi kesiapan masyarakat di suatu dusun khususnya ditinjau dari IKS untuk meningkat status desa menuju Desa Mandiri. Namun, IKE dan IKL sebagai penentu skor IDM tidak diidentifikasi. Selanjutnya, Sibyan, et.al (2020) menyajikan pentingnya penerapan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam rangka memutuskan

prioritas atau urutan Desa yang akan diintervensi proses pembangunannya dalam rangka mencapai target IDM. Dari kedua studi terdahulu tersebut, sayangnya ulasan mengenai partisipasi *stakeholders* untuk meningkatkan status IDM belum banyak mendapat perhatian. Padahal, menurut Melis, et.al (2016) mengutip pandangan Pasaribu, (1992), Keith Davis (1962) dalam Sastropetro (1998) mengungkapkan bahwa partisipasi yang diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan pikiran, emosi atau perasaan seseorang atau kelompok partisipan sangat diperlukan dalam pembangunan. Tanpa partisipasi tujuan pembangunan sulit tercapai. Dengan kata lain, tanpa adanya partisipasi, upaya untuk meningkatkan status IDM akan terhambat.

Kelompok partisipan yang dimaksud pada tulisan ini, penulis sebut dengan konsep *stakeholders*. *Stakeholders* menurut Estawara (2010) dalam Rusdianto (2013) sebagaimana dikutip oleh Pratiwi (2017) berasal dari frasa "*stake*" dan "*holder*". "*Stake*" berarti kepentingan dan "*holder*" berarti pemegang. Mengacu pada arti dari frasa itu, maka *stakeholders* dapat didefinisikan sebagai kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki kesamaan tujuan dan saling mempengaruhi untuk mewujudkan cita-cita bersama. Definisi tersebut sejalan dengan konsep *stakeholders* yang ditawarkan oleh Freeman (1984) dalam Rusdianto (2013) dan disadur oleh Pratiwi (2017) yang mendefinisikan *stakeholders* sebagai suatu organisasi, group atau individu yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi tujuan organisasi.

Menurut Soemanto (2007) dalam Pratiwi (2017) setidaknya *stakeholders* dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok yakni: masyarakat

(*community*), pemerintah (*government*) dan sektor privat (*private sector*).

*Stakeholders* tersebut secara simultan umumnya berpartisipasi dalam 4 tahapan kegiatan pembangunan. Mengacu pada ulasan Nugraha (1990), Dwiningrum (2011) yang mengutip pendapat Cohen serta Uphoff, sebagaimana disadur oleh M.Wahyuddin, et.al (2020) bahwa tahapan pembangunan yang dimaksud yakni: (a) perencanaan; (b) pelaksanaan; (c) evaluasi; dan (d) pemanfaatan hasil pembangunan.

Berdasarkan kelompok dan tahapan pembangunan tersebut, wujud dari partisipasi itu cukup beragam misalnya, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan wujudnya berupa keikutsertaan mereka dalam rapat untuk menyusun dan menetapkan program pembangunan. Pada tahap pelaksanaan, wujud dukungannya berupa pemberian material seperti uang, tenaga atau harta benda lainnya. Ditahap pemanfaatan hasil, masyarakat umumnya terlibat dalam memantau proses pemeliharaan hasil pembangunan. Pada tahap evaluasi, wujudnya masyarakat ikut serta menilai kualitas hasil-hasil pembangunan (Cohen dan Uphoff dalam Islamiah, 2018).

Selanjutnya, wujud dari partisipasi sektor privat (*private sector*) atau perusahaan dalam pembangunan umumnya tampak dalam penyelenggaraan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan berkontribusi positif untuk mengembangkan masyarakat yang menjadi fokus binaannya.

Ketika mengimplementasikan CSR, tahapan yang dilakukan mencakup 4 (empat) tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

dan tahap pelaporan. Di tahap perencanaan, perusahaan umumnya mensosialisasikan tentang komitmen manajemen tentang arti penting CSR melalui kegiatan seminar dan lokakarya. Pada tahap pelaksanaan, *private sector* mengorganisir sumber daya yang ada dengan menempatkan orang-orang sesuai dengan kompetensinya agar tujuan pelaksanaan program CSR dapat tercapai. Di tahap evaluasi, perusahaan terbuka untuk dinilai tentang sejauh mana efektivitas pelaksanaan program CSR yang digagasnya. Pada tahap terakhir, *private sector* membuat pelaporan untuk menjamin keterbukaan informasi tentang pemanfaatan CSR yang dimilikinya (Cohen dan Uphoff dalam Islamiah, 2018).

Kemudian, ditinjau dari partisipasi pemerintah, adalah suatu kewajiban bagi pemerintah untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan sesuai dengan tanggung jawab serta kewenangannya. Tahap pembangunan yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi umumnya melibatkan struktur pemerintahan di tingkat RT, Dusun/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional.

Dalam rangka menaikkan status IDM, tingkat partisipasi perlu diukur guna memastikan sampai sejauh mana keterlibatan, keikutsertaan baik pikiran, tenaga dan emosi para *stakeholders* dalam rangka meningkatkan status IDM. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, maka topik mengenai tingkat partisipasi *stakeholders* dalam peningkatan IDM relevan untuk diulas. Selain itu, dari sisi kebermanfaatannya, topik ini juga diharapkan menjadi sumber gagasan bagi para *stakeholders* guna merancang langkah-langkah kebijakan

untuk meningkatkan status IDM di wilayahnya. Oleh karena itu, secara spesifik tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi *stakeholders* dalam peningkatan Indeks Desa Mandiri (IDM) di Kabupaten Sambas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan antara Agustus 2019 hingga Desember 2019 ini mengambil lokasi pada 4 (empat) desa yang termasuk dalam prioritas peningkatan status kemandirian desa di Kabupaten Sambas khususnya di tahun 2020 (Dinsos PMD Kab. Sambas, 2019). Lokasi penelitian meliputi:

- a. Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi;
- b. Desa Durian, Kecamatan Sambas;
- c. Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas; dan
- d. Desa Sebusus, Kecamatan Paloh.

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada responden. Sementara itu, populasi pada penelitian ini terfokus pada subyek yang berhubungan dengan unsur pelaksana pembangunan di Desa. Irwin T. Sander dalam Supriatna (1997) sebagaimana disadur oleh Tata (2015) mengemukakan bahwa unsur pelaksana pembangunan di desa yaitu :1) *Local leaders* (pemerintah desa); 2) *Community organizers* (pemuka masyarakat, pengurus LKMD, RT/RW, dan lain-lain); 3) *Subject matters specialist* (kader pembangunan desa, penyuluh teknis dan lain sebagainya); 4) *Administrator* (kepala wilayah di tingkat kecamatan sampai tingkat pusat); dan 5) *Social participation* (partisipasi masyarakat).

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 60 (enam puluh) orang. Adapun karakteristik respon dapat disimak pada tabel 1 berikut ini. Responden tersebut merupakan perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus atau anggota kelompok kegiatan,

kelompok profesi warga desa, pemerintah kabupaten, aparat kecamatan, Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), pedagang, kelompok penerima bantuan dan *private sector*.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No	Desa	Umur			Jenis Kelamin	
		15-30	31-45	46-60	Laki-Laki	Perempuan
1	Sempalai Sebandang	3	8	4	12	3
2	Durian	4	7	4	12	3
3	Sumber Harapan	3	6	6	13	2
4	Sebubus	2	10	3	12	3
Jumlah Responden			60 orang			

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian berdasarkan Jenis Kelamin

No	Desa	Pendidikan						
		Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	D3	S-1	S-2
1	Sempalai Sebandang	1	1	1	4	2	5	1
2	Durian	0	1	0	7	2	3	2
3	Sumber Harapan	0	1	0	7	1	3	2
4	Sebubus	0	1	1	8	0	4	1
Jumlah Responden		60 orang						

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat, pemerintah, *private sector* dilakukan dengan menggunakan *skala likert*. Menurut Riduan (2014), *skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.

Gejala sosial tersebut disebut sebagai variabel penelitian. Dengan menggunakan skala *likert*, variabel yang diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel, kemudian sub variabel dijabarkan menjadi indikator sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3. Variabel dan Indikator Penelitian

Dimensi	Variabel	Indikator
Tingkat Partisipasi Masyarakat	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat mengikuti rapat desa/dusun</li> <li>Masyarakat menyampaikan kebutuhan mereka yang perlu dimasukkan dalam kegiatan pembangunan desa</li> <li>Masyarakat turut serta dalam memutuskan prioritas pembangunan yang dilaksanakan di desa</li> </ol>
	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan desa</li> <li>Masyarakat memberikan sumbangan materi/uang dalam pelaksanaan pembangunan desa</li> </ol>

Dimensi	Variabel	Indikator
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Masyarakat memberikan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan pembangunan desa</li> <li>4. Masyarakat turut mensosialisasikan kegiatan pembangunan desa</li> </ol>
	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mengawasi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa</li> <li>2. Masyarakat melakukan pengaduan ke pihak desa/stakeholder terkait apabila terjadi permasalahan dalam kegiatan pembangunan desa</li> </ol>
	Pemanfaatan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat merasakan keuntungan/manfaat hasil dari pembangunan desa</li> <li>2. Masyarakat ikut merawat/memelihara hasil pembangunan desa</li> </ol>
Tingkat Partisipasi Pemerintah	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan/membuat regulasi (perda, perub, kebijakan/ strategi) yang menjadi acuan untuk pembangunan desa</li> <li>2. Pemerintah terlibat dalam perencanaan kegiatan pembangunan desa (penyusunan program Kabupaten untuk mendukung pembangunan desa dan membantu desa merancang program pembangunan desa)</li> </ol>
	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan desa</li> <li>2. Mempermudah akses perizinan/pelayanan bagi pembangunan desa</li> <li>3. Menjadi penengah apabila terjadi konflik di masyarakat terkait pembangunan desa</li> <li>4. Pemerintah memberikan bantuan alat/bahan untuk pembangunan desa</li> <li>5. Memberikan/membuka akses kerjasama ekonomi dengan lembaga pemberi dana (perbankan, koperasi, NGO, dll) untuk mempercepat pembangunan desa</li> </ol>
	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pendampingan dalam monitoring pembangunan desa</li> <li>2. Pemerintah mengawasi kesesuaian perencanaan/pelaksanaan kegiatan pembangunan desa</li> <li>3. Memfasilitasi/memproses aduan terkait apabila terjadi permasalahan dalam kegiatan pembangunan desa</li> <li>4. Pemerintah menilai penting keberadaan hasil-hasil pembangunan desa</li> </ol>
	Pemanfaatan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah merasakan keuntungan/manfaat hasil dari pembangunan desa</li> <li>2. Pemerintah ikut merawat/memelihara hasil pembangunan desa</li> </ol>
Tingkat Partisipasi Private Sector/ Swasta	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pembangunan desa</li> </ol>
	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan CSR (Pinjaman, program kegiatan, hibah) untuk pembangunan desa</li> <li>2. Terlibat dalam pengelolaan sektor produk desa</li> </ol>
	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi kebermanfaatan bantuan yang diberikan dalam kegiatan pembangunan desa</li> </ol>
	Pemanfaatan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turut serta merawat/memelihara hasil pembangunan desa</li> </ol>

Sumber: Olahan Penulis, 2019

Indikator-indikator pada tabel 3 itu, dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen berupa pernyataan yang dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut.

- Selalu (5)
- Sering (4)
- Kadang-kadang (3)
- Jarang (2)
- Tidak Pernah (1)

Selanjutnya, mengacu pada pendapat Riduwan (2014), jawaban responden tersebut dianalisis dengan langkah-langkah seperti berikut ini:

- 1) Mentabulasikan data isian responden.
- 2) Menghitung interval rentang data isian responden dengan cara mencari nilai minimal dan nilai maksimal, dengan rumus sebagai berikut :  
 Nilai minimal =  $B_R \times P \times n$   
 Nilai maksimal =  $B_T \times P \times n$   
 Keterangan :  
 $B_R$  = Nilai terendah  
 $B_T$  = Nilai tertinggi  
 $P$  = Variabel yang diteliti  
 $n$  = Jumlah responden
- 3) Menghitung nilai bobot untuk setiap variabel isian responden dengan rumus sebagai berikut :  
 Jumlah bobot =  $(n_1 \times S_{1-5}) + (n_i \times S_{1-5})$   
 Keterangan :  
 $n$  = Jumlah responden  
 $s$  = penilaian responden untuk setiap variable (bernilai 1 sampai dengan 5)
- 4) Menentukan nilai persentase untuk setiap variable dan menginterpretasinya dengan cara sebagai berikut :  
 Persentase bobot =  $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Nilai maksimal}} \times 100$

- 5) Menentukan kriteria intepretasi skor dengan kategori sebagai berikut:

- Persentase 0% - 20% = Tingkat Partisipasi Sangat Lemah
- Persentase 21% - 40 % = Tingkat Partisipasi Lemah
- Persentase 41% - 60 % = Tingkat Partisipasi Cukup
- Persentase 61% - 80 % = Tingkat Partisipasi Kuat
- Persentase 81% - 100% = Tingkat Partisipasi Sangat Kuat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan

Berdasarkan tabel 4 di bawah ini, mengkonfirmasi bahwa tingkat patisipasi masyarakat pada porses perencanaan pembangunan untuk meningkatkan IDM tergolong “kuat” dan “sangat kuat” yakni direntang 69,33%-90,67%. Hasil tersebut memiliki arti responden secara umum menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan adalah sesuatu yang sangat penting. Menurut keterangan responden, persepsi itu terbangun atas kesadaran bahwa pada tahap perencanaan inilah masyarakat baik secara langsung maupun melalui perwakilannya, dapat mengemukakan usulannya serta ikut secara aktif memutuskan prioritas pembangunan di desa.

Meskipun tingkat partisipasi tersebut umumnya dalam kategori “kuat” dan “sangat kuat”, akan tetapi, masih terdapat masyarakat desa yang belum maksimal tingkat partisipasinya dalam perencanaan. Desa yang dimaksud adalah Desa Sebusus. Faktor penyebabnya yakni letak dusun dengan ibu kota desa sebagai pusat kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembagunan Desa (Musrenbangdes) yang terbilang cukup

jauh. Selain itu, jumlah dusun yang menjadi bagian dari Desa Sebusus yang mencapai 10 Dusun. Hal itu

menyebabkan tidak seluruh aspirasi dari masyarakat dusun dapat diakomodir pada perencanaan desa.

Tabel 4. Tingkat Persepsi dan Realias Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

No	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Desa Sempalai Sempedang (%)	Desa Durian (%)	Desa Sumber Harapan (%)	Desa Sebusus (%)
1	Masyarakat mengikuti rapat di desa/dusun	90,67	82,67	84	73,33
2	Masyarakat menyampaikan kebutuhan mereka yang perlu dimasukkan dalam kegiatan pembangunan desa	90,67	82,67	84	73,33
3	Masyarakat turut serta dalam memutuskan prioritas pembangunan yang dilaksanakan di desa	82,67	82,67	80	69,33

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

### Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan dikategorikan “cukup” hingga “kuat”. Persentase tingkat partisipasinya mulai dari 42,67%-85,33%.

Tingkat persentase yang tergolong “cukup” hanya pada indikator kesediaan masyarakat untuk memberikan materinya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan. Hal itu terjadi karena masyarakat menilai bahwa kegiatan pembangunan di desa sumber utama pendanaannya telah tersedia. Sumber pendanaan utama yang dimaksud yakni berasal dari kewajiban pemerintah pusat untuk

mengalokasikan anggaran transfer ke desa berupa Dana Desa (DD) dan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten. Implikasinya, masyarakat pada umumnya bersedia memberikan dukungan berupa materi jika terdapat pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Selebihnya, indikator-indikator lainnya terkonfirmasi masuk dalam kategori “kuat”. Kenyataan ini terjadi karena didukung oleh faktor internal, dimana masyarakat pada empat desa tersebut hingga saat ini, hubungan kekeluargaannya masih terjaga, terpeliharanya semangat gotong royong, serta mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.



Tabel 5. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan	Desa Sempalai Sempedang (%)	Desa Durian (%)	Desa Sumber Harapan (%)	Desa Sebusus (%)
1	Masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan desa	85,33	80,00	80,00	74,67
2	Masyarakat memberikan materi/uang dalam pelaksanaan pembangunan desa	53,33	52,00	49,33	42,67
3	Masyarakat memberikan tenaga dalam pelaksanaan pembangunan desa	70,67	70,67	70,67	68,00
4	Masyarakat turut mensosialisasikan kegiatan pembangunan desa	66,67	70,67	69,33	72,00

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

### Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan sangat diperlukan bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan (Rahman dan Rosmita, 2019). Berkenaan dengan hal itu, tabel 6 mengkonfirmasi tingkat partisipasi

masyarakat dalam evaluasi pembangunan tergolong “kuat”, yakni di kisaran 62,67%-80,00%. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengawasi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dalam bentuk penyampaian kritikan, masukan dan saran bahkan pertanyaan langsung ke pihak-pihak terkait mulai dari perangkat RT, dusun, desa, kecamatan hingga pihak-pihak di kabupaten.

Tabel 6. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan

No	Partisipasi masyarakat dalam Evaluasi	Desa Sempalai Sempedang (%)	Desa Durian (%)	Desa Sumber Harapan (%)	Desa Sebusus (%)
1	Masyarakat mengawasi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa	78,67	80,00	76,00	72,00
2	Masyarakat melakukan pengaduan ke pihak desa/stakeholders apabila terjadi permasalahan dalam kegiatan pembangunan desa	76,00	74,67	68,00	62,67

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

### Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Unsur yang sering dilupakan dalam proses pembangunan adalah tentang pentingnya partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Hal ini diperlukan karena jika hasil pembangunan tidak dimanfaatkan, maka harapan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan sulit dicapai. Disamping itu, berdasarkan pendapat Aprilia (2014) dalam Rahman dan Rosmita (2019), pemanfaatan hasil pembangunan juga akan menumbuhkan kerelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program.

Berdasarkan tabel 7 berikut, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan pada empat desa sampel penelitian tergolong “kuat” dan “sangat kuat”.

Tabel 7. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

No	Partisipasi masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil	Desa Sempalai Sempedang (%)	Desa Durian (%)	Desa Sumber Harapan (%)	Desa Sebusub (%)
1	Masyarakat merasakan keuntungan/manfaat hasil dari pembangunan desa	89,33	90,67	92,00	86,67
2	Masyarakat ikut merawat/memelihara hasil dari pembangunan desa	70,67	78,67	69,33	69,33

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

### Tingkat Partisipasi Pemerintah Dalam Perencanaan

Perencanaan pembangunan di desa sebaiknya bersifat partisipatif. Oleh sebab itu, keberadaan pemerintah sangat diperlukan guna memastikan keterlibatan masyarakat secara partisipatif tersebut. Keterlibatan masyarakat diperlukan guna menjamin agar kebijakan yang ditetapkan tidak

Keberadaan hasil pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, saluran drainase dan irigasi, kantor desa, PAUD, Posyandu dan rumah ibadah dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka. Keberadaan infrastruktur tersebut juga dinilai bermanfaat untuk meningkatkan status IDM. Oleh sebab itu, masyarakat berupaya memanfaatkan sekaligus merawat fasilitas tersebut dengan maksimal.

Demikian pula dengan pembangunan non fisik. Program pemberdayaan yang mencakup kegiatan PKK, Posyandu, majelis taklim, remaja masjid, karang taruna serta pendidikan anak usia dini mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. Keberadaannya dinilai sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat, kuat, memiliki pengetahuan serta memiliki jiwa solidaritas yang tinggi antar satu dengan lainnya.

bersifat *top down*. Tujuannya adalah agar manfaat dari kegiatan pembangunan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat (Imtihan, Wahyunadi dan Firmansyah, 2017).

Pada tahap perencanaan, partisipasi pemerintah sebetulnya tidak bersifat tunggal, tetapi bersifat kalaborasi yakni antara pemerintah, masyarakat serta *stakeholders* lainnya.

Kolaborasi itu terjadi mulai dari musrenbang di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Namun, patut disadari bahwa pemerintah adalah tangga utama yang memiliki kewenangan membuat regulasi sekaligus memutuskan program dan kegiatan yang direncanakan di pedesaan. Tanpa pemerintah, rumusan-rumusan yang dihasilkan di musrenbang tidak berarti apa-apa. Usulan dari masyarakat tidak akan terakomodir jika pemerintah tidak terlibat atau berpartisipasi. Dengan demikian, partisipasi pemerintah

bersifat mutlak dalam proses perencanaan pembangunan.

Tabel 8 menerangkan dari sisi penyiapan regulasi yang dapat dijadikan acuan dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Responden menilai tingkat partisipasi pemerintah tergolong “kuat” dan “sangat kuat”, sedangkan pada indikator yang kedua, responden menilai tingkat partisipasi pemerintah dalam menyusun pogram pembangunan direntang kategori “cukup” hingga “sangat kuat”.

Tabel 8. Tingkat Partisipasi Pemerintah Dalam Perencanaan

No	Partisipasi Pemerintah dalam Perencanaan	Desa Sempalai Sempedang (%)	Desa Durian (%)	Desa Sumber Harapan (%)	Desa Sebusus (%)
1	Pemerintah menetapkan/membuat regulasi (perda, perbub, kebijakan/ starategi) yang menjadi acuan untuk pembangunan desa	80,00	90,	84,00	76,00
2	Pemerintah terlibat dalam perencanaan kegiatan pembangunan desa (penyusunan program kabupaten untuk mendukung pembangunan desa dan membantu desa merancang program pembangunan desa)	77,33	85,33	77,33	60,00

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

### Tingkat Partisipasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Responden menilai, sejauh ini tingkat partisipasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di keempat desa sampel, khususnya pada indikator pertama, kedua dan ketiga, tergolong “kuat” dan “sangat kuat”. Pemerintah dinilai telah maksimal dalam memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Unsur yang melakukan pendampingan secara rutin terutama

dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas serta tenaga pedamping desa yang berkedudukan di kecamatan.

Peran pemerintah umumnya terkait dengan mendampingi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ). Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas di desa sangat memerlukan pendampingan dalam hal pelaporan tersebut agar terhindar dari kesalahan

yang berimplikasi pada persoalan hukum.

Sedangkan peran pendamping desa sebagaimana diamanahkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun (2015) tentang Pendamping Desa telah dirasakan oleh perangkat di pedesaan. Peran yang dimaksud diantaranya: (a) mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; (b) mendampingi desa dalam

pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan (c) melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan.

Pada indikator kelima, responden menilai bahwa peran pemerintah terkategori “cukup”. Pemerintah dinilai belum sepenuhnya mampu membuka akses kerjasama dengan investor dalam mengelola potensi yang tersedia di desa seperti lada, padi, karet, sawit, kain tenun, perikanan, tambang, air, danau dan wisata alam, padahal jika potensi tersebut terkelola, niscaya perekonomian masyarakat akan meningkat.

Tabel 9. Tingkat Partisipasi Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan

No	Partisipasi Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan	Desa Sempalai Sempedang (%)	Desa Durian (%)	Desa Sumber Harapan (%)	Desa Sebusus (%)
1	Pemerintah memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan desa	81,33	90,67	82,67	80,00
2	Pemerintah mempermudah proses perizinan dan pelayanan yang dibutuhkan dalam pembangunan desa	76,00	81,33	77,33	84,00
3	Pemerintah menjadi penengah apabila terjadi konflik di masyarakat terkait pembangunan desa	74,67	72,00	69,33	76,00
4	Pemerintah memberikan bantuan peralatan/bahan untuk pembangunan desa	66,67	68,00	62,67	58,67
5	Pemerintah memberikan/membuka akses kerjasama ekonomi dengan lembaga pemberi dana untuk mempercepat pembangunan desa	56,00	49,33	58,67	58,67

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

### Tingkat Partisipasi Pemerintah Dalam Evaluasi Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat dilakukan secara

efektif dan efisien. Untuk memastikan hal itu, evaluasi terhadap program dan kegiatan wajib dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara aspek perencanaan dan

pelaksanaan. Dengan mengevaluasi kesesuaian tersebut, maka ketercapaian *output*, *outcome*, *benefit* hingga *impact* dari suatu program dan kegiatan dapat terukur. Berkenaan dengan itu, pada Kabupaten Sambas, ketercapaian yang diperhatikan utamanya adalah berkenaan dengan *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan dengan peningkatan status IDM di suatu desa.

Bentuk evaluasi pembangunan di Kabupaten Sambas adalah berupa audit terhadap penggunaan anggaran

(DD) dan (ADD). Keberadaan dana-dana tersebut dipastikan agar penggunaan tepat sasaran dan pertanggungjawaban keuangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berkenaan dengan itu, tingkat partisipasi pemerintah dalam evaluasi pembangunan dinilai oleh responden di rentang “cukup” dan “sangat kuat”. Namun yang paling dominan adalah dikategori “sangat kuat”.

Tabel 10. Tingkat Partisipasi Pemerintah dalam Evaluasi pembangunan

No	Partisipasi dalam Pembangunan	Pemerintah Evaluasi	Desa Sempalai Sempedang (%)	Desa Durian (%)	Desa Sumber Harapan (%)	Desa Sebusus (%)
1	Pemerintah memberikan pendampingan dalam memonitoring hasil pembangunan	memberikan dalam hasil	77,33	81,33	73,33	76
2	Pemerintah kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	mengawasi antara dan	82,67	85,33	80,00	81,33
3	Pemerintah atau memproses terkait permasalahan pembangunan di desa	memfasilitas aduan dengan	76,00	78,67	60,00	60,00
4	Pemerintah urgensi atau kepentingan pembangunan	menilai tingkat hasil-hasil	81,33	84,00	69,33	76,00

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

### Tingkat Partisipasi Pemerintah Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Hasil pembangunan dapat berbentuk fisik dan non fisik. Hasil pembangunan fisik adalah sesuatu yang tampak seperti bangunan, jalan, jembatan, sarana sanitasi dan lain sebagainya. Sebaliknya hasil non fisik umumnya berupa upaya-upaya peningkatan kualitas kesehatan,

pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada pedesaan, hasil pembangunan fisik dan non fisik keberadaanya sangat diperlukan khususnya berkaitan dengan upaya peningkatan status IDM. IDM diukur dengan pendekatan kuantitatif, yang isinya adalah berupa data-data mengenai perkembangan IKL, IKE dan IKS. Jajaran pemerintah seperti

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Republik Indonesia memanfaatkan hasil capaian pembangunan tersebut, yang telah di konversi ke dalam angka-angka atau poin-poin untuk menentukan dan menetapkan status desa mulai dari sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju hingga mandiri.

Mengenai hal itu, responden menilai tingkat partisipasi pemerintah dalam pemanfaatan hasil pembangunan di kategori “cukup” hingga “sangat kuat”. Kategori sangat kuat terutama pada indikator pertama dimana pemerintah sejauh ini telah menerima manfaat dari hasil pembangunan di desa terutama dalam meningkatkan status IDM. Sedangkan dari sisi perawatan terhadap hasil pembangunan yang berbentuk fisik, masih harus di dorong ke arah yang lebih baik.

Tabel 11. Tingkat Partisipasi Pemerintah dalam Pemanfaatan Hasil pembangunan

No	Partisipasi Pemerintah dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan	Desa Sempalai Sempedang (%)	Desa Durian (%)	Desa Sumber Harapan (%)	Desa Sebusus (%)
1	Pemerintah merasakan keuntungan/manfaat hasil dari pembanguna desa	78,67	85,33	65,33	69,33
2	Pemerintah ikut merawat/memelihara hasil dari pembangunan desa	66,67	69,33	60,00	56,00

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

### Tingkat Partisipasi *Private Sector* Dalam Perencanaan Pembangunan

Pembangunan akan maksimal apabila direncanakan secara bersinergi karena di dalam sinergitas terdapat interaksi dan kerjasama antar pihak. Dengan adanya sinergitas, perencanaan akan lebih maksimal daripada yang direncanakan sendiri-sendiri. Covey's (2008) dalam Maulana (2019) berpendapat sinergisitas menggambarkan suatu kerja dalam kelompok. Dengan bekerja kelompok berbagai perbedaan dan kepentingan dapat diakomodir.

Salah satu pihak yang harus hadir dalam sinergitas itu adalah *private sector*. *Private sector* merupakan pihak yang umumnya dapat diandalkan misalnya dalam hal membantu pendanaan pembangunan dan pendampingan program pemberdayaan.

Kaitan dengan itu, responden menilai, tingkat partisipasi *private sector* dalam perencanaan pembangunan “cukup” dan “kuat” yakni di rentang 58,67% sampai 72,00 %. Hal itu menjadi penanda bahwa keterlibatan *private sector* dalam perencanaan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 12. Tingkat Partisipasi *Private Sector* dalam Perencanaan Pembangunan

No	Partisipasi <i>Private Sector</i> dalam Perencanaan Pembangunan	Desa Sempalai Sempedang (%)	Desa Durian (%)	Desa Sumber Harapan (%)	Desa Sebusus (%)
1	<i>Private Sector</i> dilibatkan dalam Perencanaan Pembangunan	72,00	62,67	58,67	65,33

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

### Tingkat Partisipasi *Private Sector* dalam Pelaksanan Pembangunan

Untuk mengukur tingkat partisipasi *private sector* dalam pembangunan, terdapat 2 (dua) indikator yang dinilai. Indikator pertama adalah sejauh mana partisipasi *private sector* memberikan bantuan CSR untuk pembangunan desa. Indikator kedua berkenaan dengan keterlibatan *private sector* dalam mengelola potensi desa.

Pada indikator pertama, responden di Desa Durian dan Desa Sebusus mengklasifikasinya dalam kategori “lemah” dan “cukup”. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan *private sector* di sekitar wilayah pedesaan, kehadirannya belum maksimal dalam menyokong pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Dengan kata lain, CSR yang tersedia belum dirasakan dampaknya hingga ke tingkat desa.

Pada indikator kedua, juga demikian, di Desa Durian dan Desa Sebusus, responden memberikan klasifikasi bahwa di indikator tersebut masuk dalam klasifikasi “cukup”. Mayoritas desa sampel diketahui memiliki potensi seperti lada, padi, karet, sawit, kain tenun, perikanan, tambang, danau dan wisata alam. Namun, potensi tersebut belum dapat dikelola dengan maksimal. Masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan dari *private sector* untuk membantu baik dalam hal pendanaan maupun pembinaan SDM. Tujuannya adalah agar potensi desa dapat diolah menjadi produk unggulan desa yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat desa. Akan tetapi, harapan tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

Tabel 13 Tingkat Partisipasi *Private Sector* dalam Pelaksanan pembangunan

No	Partisipasi <i>Private Sector</i> dalam Pelaksanaan pembangunan	Desa Sempalai Sempedang (%)	Desa Durian (%)	Desa Sumber Harapan (%)	Desa Sebusus (%)
1	<i>Private Sector</i> memberikan bantuan CSR untuk pembangunan desa	74,67	37,33	58,67	42,67
2	<i>Private Sector</i> terlibat dalam pengelolaan potensi produk desa	61,33	42,67	54,67	45,33

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

### Tingkat Partisipasi *Private Sector* dalam Evaluasi Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan seperti yang telah di jelaskan pada

bagian terdahulu adalah bersifat kalaborasi. Begitu pula dengan pelaksanaan evaluasinya. Meskipun demikian, *private sector* memiliki kedudukan tersendiri dalam rangka

mengevaluasi hasil pembangunan. Basis penentuan kedudukan *private sector* umumnya ditinjau dari mana sumber daya atau dana pembangunan berasal. Jika sumber tersebut berasal dari *private sector*, maka terdapat hak dan kewajibannya untuk melakukan evaluasi.

Kaitannya dengan tingkat partisipasi *private sector* dalam mengevaluasi pembangunan di desa sampel penelitian, penilaian responden dominan di kategori “cukup”. Artinya sumber daya dan dana yang telah dikeluarkan *private sector* dalam mendukung pembangunan, kegunaan atau manfaatnya jarang dievaluasi.

Tabel 14 Tingkat Partisipasi *Private Sector* dalam Evaluasi pembangunan

No	Partisipasi <i>Private Sector</i> dalam Evaluasi pembangunan	Desa Sempalai Sempedang (%)	Desa Durian (%)	Desa Sumber Harapan (%)	Desa Sebusus (%)
1	<i>Private Sector</i> mengevaluasi kebermanfaatan bantuan yang diberikan dalam kegiatan pembangunan desa	73,33	56,00	53,33	52,00

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

### Tingkat Partisipasi *Private Sector* dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, hasil pembangunan dapat berbentuk fisik dan non fisik. Jika hasil pembangunan berbentuk fisik seperti bangunan, maka *private sector* dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk melatih masyarakat dalam meningkatkan SDMnya. Selain itu, *private sector* juga dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan bangunan untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Sementara itu, jika hasil pembangunan berbentuk non fisik, misalnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas SDM di sekitar perusahaan, sebagai dampak dari terdapatnya sekolah yang didirikan oleh *private sector*, maka tenaga-tenaga yang dihasilkan dan telah terdidik tersebut dapat dimanfaatkan oleh

*private sector* untuk mengisi kebutuhan pekerja di perusahaannya. Hasil pembangunan yang demikian terlihat sangat penting. Oleh sebab itu, keberlanjutannya harus diusahakan terutama oleh *private sector*. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara merawat hasil pembangunan baik berupa fisik dan non-fisik itu.

Tingkat partisipasi *private sector* dalam pemanfaatan hasil pembangunan, khususnya ditinjau dari sejauh mana keterlibatan mereka dalam merawat hasil pembangunan, agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, dinilai masuk dalam terkategori “cukup”. Itu artinya tingkat partisipasi *private sector* yang tersebut berbanding lurus dengan masih minimnya kontribusi *private sector* dalam menyokong pembangunan di pedesaan.

Tabel 15 Tingkat Partisipasi *Private Sector* dalam Evaluasi pembangunan



No	Partisipasi <i>Private Sector</i> dalam Pemanfaatan Hasil pembangunan	Desa Sempalai Sempedang (%)	Desa Durian (%)	Desa Sumber Harapan (%)	Desa Sebus (%)
1	<i>Private Sector</i> turut serta merawat/memlihara hasil pembangunan desa	68,00	60,00	53,33	56,00

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, tingkat partisipasi *stakeholders* dalam peningkatan Indeks Desa Mandiri (IDM) di Kabupaten Sambas cukup beragam. *Stakeholders* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah masyarakat, pemerintah dan *private sector*. Keberagaman tingkat partisipasi yang adalah sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat ditinjau dari variabel perencanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan tergolong “kuat” dan “sangat kuat”. Hal itu disebabkan terdapatnya kesadaran masyarakat bahwa di setiap tahapan pembangunan tersebut, prioritas pembangunan dapat diusulkan, hasil pembangunan dapat dievaluasi dan hasil pembangunan baik yang berbentuk fisik dan non fisik harus dirawat dan dimanfaatkan secara maksimal. Sedangkan di variabel pelaksanaan pembangunan, tingkat partisipasi masyarakat tergolong “kuat”, khususnya ditinjau dari kesediaan masyarakat memberikan sumbangan pemikiran, tenaga serta mensosialisasikan kegiatan pembangunan di desa. Namun, mengenai kesediaan masyarakat memberikan materi/uang untuk pembangunan desa masuk dalam kategori “cukup”. Hal itu karena mereka menilai pendanaan di desa saat ini sudah cukup tersedia

utamanya bersumber dari DD dan ADD.

2. Tingkat partisipasi pemerintah ditinjau dari variabel perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan tergolong “kuat” dan “sangat kuat”, artinya indikator seperti penyiapan regulasi, keterlibatan pemerintah dalam penyusunan program, pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan, evaluasi menyangkut audit pemanfaatan DD dan ADD, serta pemanfaatan hasil pembangunan telah sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian, indikator seperti sejauh mana kemampuan pemerintah untuk membuka akses kerjasama dengan investor dalam mengelola potensi di desa masih perlu ditingkatkan atau dalam kategori “cukup”. Sama halnya jika ditinjau dari sisi perawatan terhadap hasil pembangunan yang berbentuk fisik, masih perlu didorong ke arah yang lebih baik.
3. Tingkat partisipasi *private sector* secara umum tergolong “lemah” dan “cukup”. Mulai dari tahapan perencanaan hingga pemanfaatan hasil tingkat partisipasi *private sector* masih perlu ditingkatkan. Responden menilai CSR yang tersedia belum dirasakan dampaknya hingga ke tingkat desa. *Stakeholders* yang pertama adalah masyarakat

## REKOMENDASI

Tingkat partisipasi yang maksimal dari *stakeholders* diperlukan untuk meningkatkan status IDM di suatu daerah. Kesimpulan tulisan ini mengkonfirmasi bahwa partisipasi dari masyarakat dan pemerintah telah sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun demikian, sambil terus mempertahankan tingkat partisipasi yang sudah terkategori “baik” atau “sangat baik” itu, hal-hal lainnya seperti mendorong masyarakat agar bersedia memberikan materi untuk mendukung pembangunan di pedesaan serta mendorong pemerintah untuk semakin pro-aktif membuka akses kerjasama dalam rangka mengelola potensi di desa hendaknya terus diupayakan.

Kemudian, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa tingkat partisipasi *private sector* masih belum sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, tingkat partisipasinya dipandang masih perlu ditingkatkan. *Private sector* perlu terus didorong agar dapat memaksimalkan potensi CRS yang mereka miliki baik untuk pengembangan SDM, pengelolaan potensi desa hingga pelaksanaan pembangunan lainnya. Oleh sebab itu, potensi CRS *private sector* dapat dipetakan terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang agar keberadaannya dapat diarahkan guna mendukung program dan kegiatan yang dapat mengungkit kenaikan status IDM di suatu wilayah.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat yang telah membiayai kegiatan penelitian ini di tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Sosial dan PMD Kab. Sambas (2019) *e-Book Indeks Desa Mandiri (IDM) Kabupaten Sambas 2019*. Sambas.
- eQuator.co.id (2019) *Mengunjungi Desa Mandiri Pertama di Kalbar*, <https://equator.co.id/mengunjungi-desamandiri-pertama-di-kalbar/>. Available at: <https://equator.co.id/mengunjungi-desamandiri-pertama-di-kalbar/> (Accessed: 10 April 2019).
- Imtihan, H., Wahyunadi and Firmansyah (2017) ‘Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Ds. Taman sari Kecamatan Gunungsari kabupaten Lombok Barat)’, *Neo-Bis*, 11(1). Available at: <http://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/view/2952>.
- Islamiah, N. (2018) *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembagunan Di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar*. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Kadarsih, S., Bayuardi, G. and Equanti, D. (2020) ‘Identifikasi Kesiapan Masyarakat Dusun Mulia Menuju Desa Mandiri Tahun 2019 (Studi Kasus Dusun Mulia Desa Persiapan Permata Jaya)’, *SOSIA: HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(1), pp. 37–51.
- Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 52 Tahun 2018 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

- M.Wahyuddin, Mustari, H. and Harna (2020) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan', *Phinisi Integation Review*, 3(1), pp. 90–99.
- Maulana, S. (2019) *Sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional*. Bogor.
- Melis, Muthalib, A. A. and Apoda (2016) 'Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara)', *Jurnal Ekonomi*, 1(1), pp. 99–105. Available at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JE> %0A<http://ojs.uho.ac.id/index.php/JE/article/view/974/620>.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM).
- Pratiwi, S. A. (2017) *Implementasi Kebijakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Studi Terhadap Implemetasi Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada PT Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan)*. Universitas Brawijaya Malang.
- Rahman, A. and Rosmita (2019) 'Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembagunan Infrastruktur di Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir', *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 1(2), pp. 57–75.
- Riduwan (2014) *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Sibyan, H., Hidayat, M. and Faturafiqoh, H. (2020) 'Penerapan Algoritma Analytical Hierarchy Process Dalam Pengambilan Keputusan Penentuan Prioritas Intervensi Pembangunan Desa', *JUSTINDO (Jurnal Sistem & Teknologi Indonesia)*, 5(2), pp. 60–68.
- Supriatna, T. (1997) *Birokrasi, Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Tata, E. (2015) *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara*. FISIP UNSRAT.